



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 8
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Selasa 3 September 2024
Waktu	: 13.00 WIB - selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Pembahasan Laporan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023; 2. Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2025; 3. Isu-isu aktual.
Ketua Rapat	: Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag.
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin, S.S., M.Si
Hadir	: 1. 39 dari 52 Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. Kepala BNPB beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 13.45 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan agenda "Pembahasan Laporan Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025, dan Isu-isu Aktual", disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami Laporan Keuangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp5.435.168.423.433,-** atau **99,16%** dari Pagu Anggaran sebesar **Rp5.481.143.903.000,-** dengan Realisasi Anggaran menurut Satuan Unit Kerja sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
A	Program Dukungan Manajemen	299.441.658.000	294.358.138.159	98,30%
1	Sekretariat Utama	271.583.816.000	266.894.650.760	98,27%
2	Inspektorat Utama	13.000.000.000	12.993.867.591	99,96%
3	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	14.857.842.000	14.469.619.808	97,56%
B	Program Ketahanan Bencana	5.181.702.245.000	5.140.810.285.274	99,21%
1	Deputi Bidang Sistem dan Strategi	65.527.000.000	65.429.898.961	99,87%
2	Deputi Bidang Pencegahan	144.909.300.000	119.310.874.696	82,38%
3	Deputi Bidang Penanganan Darurat	4.733.880.689.000	4.727.482.122.288	99,86%
4	Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	20.550.000.000	20.541.564.296	99,95%
5	Deputi Bidang Logistik dan Peralatan	23.000.000.000	22.978.221.795	99,99%
6	Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan	150.698.750.000	144.300.246.568	95,75%
7	Pusat Pengendalian Operasi	43.136.506.000	40.767.356.670	94,51%
	Total	5.481.143.903.000	5.435.168.423.433	99,16%

2. Komisi VIII DPR RI dapat memahami Rencana Kerja dan Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp927.574.663.000**, dengan rincian menurut Satuan Unit Kerja sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Total
1	Program Dukungan Manajemen	306.396.339.000
1.1	Sekretariat Utama	284.474.439.000

1.2	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	9.921.900.000
1.3	Inspektorat Utama	12.000.000.000
2	Program Ketahanan Bencana	621.178.324.000
2.1	Deputi Bidang Sistem dan Strategi	15.042.000.000
2.2	Deputi Bidang Pencegahan	57.511.764.000
2.3	Deputi Bidang Penanganan Darurat	260.924.000.000
2.4	Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	20.488.000.000
2.5	Deputi Bidang Logistik dan Peralatan	45.812.000.000
2.6	Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan	76.741.399.000
2.7	Pusat Pengendalian Operasi	144.659.161.000
Total		927.574.663.000

Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menselaraskan program penanggulangan bencana dengan program Pemerintah tahun 2025.

3. Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp1.887.896.280.000,-** dengan rincian menurut Satuan Unit Kerja sebagai berikut:

No	Rincian Kegiatan	Unit Kerja	Anggaran (Rp)	Total Anggaran (Rp)
1.	<u>Kebutuhan tambahan belanja pegawai dan kenaikan tunjangan</u>	Sekretariat Utama	50.000.000.000	60.000.000.000
2.	<u>Pemindahan pegawai ke IKN</u>		10.000.000.000	
3.	<u>Menginisiasi pelaksanaan kegiatan executive training penanggulangan bencana bagi Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota se-Indonesia (200 orang)</u>	Pusdiklat PB	536.280.000	536.280.000
4.	<u>Penguatan kelembagaan BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota melalui penyediaan logistik dan peralatan</u>	Kedeputian Bidang Logistik dan Peralatan	1.700.000.000.000	1.700.000.000.000
5.	<u>Dukungan sarana dan prasarana Pusdalops BPBD Provinsi Baru</u>	Pusdalops	17.000.000.000	19.110.000.000
6.	<u>Peningkatan kapasitas SDM Pusdalops BPBD Kabupaten/Kota se-Indonesia</u>		2.110.000.000	
7.	<u>Sidang ISO TC 292 Security and Resilience Tahun 2025</u>	Kedeputian Bidang Sistem dan Strategi	5.000.000.000	5.000.000.000

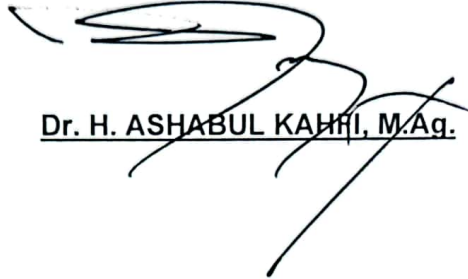
8.	Penguatan mitigasi bencana melalui pemasangan rambu dan papan informasi bencana pada daerah yang rawan bencana	Kedeputan Bidang Pencegahan	10.000.000.000	103.250.000.000
9.	Koordinasi forum mitigasi bencana		1.000.000.000	
10.	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana melalui Program Desa Tangguh Bencana di 30 Desa		10.000.000.000	
11.	Pendampingan Penyusunan Renkon untuk Provinsi Baru		5.250.000.000	
12.	Pendampingan Penyusunan RPKB untuk Provinsi Baru		5.250.000.000	
13.	Pembentukan Unit Layanan Disabilitas di 5 Lokasi		1.750.000.000	
14.	Pemasangan <i>early warning system</i> antisipasi potensi bencana hidrometeorologi		70.000.000.000	
Total				

4. Komisi VIII DPR RI meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana agar menindaklanjuti pandangan dan pendapat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
- a. Meningkatkan kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam merespons isu-isu kebencanaan seperti isu megathrust sehingga tidak menimbulkan kegaduhan/polemik di masyarakat.
 - b. Mendukung apel Kesiapsiagaan dan Simulasi Evakuasi Mandiri di 5 provinsi sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan mitigasi bencana.
 - c. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah serta memperhatikan kearifan lokal dalam rangka penanggulangan dan mitigasi di daerah rawan bencana.
 - d. Mendukung usulan penambahan anggaran untuk revitalisasi logistik, sarana dan prasarana, serta peralatan penanggulangan bencana.
 - e. Meningkatkan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait kesinambungan program kebencanaan pada Pemerintahan berikutnya.
 - f. Terlibat secara aktif dalam melakukan analisis dan supervisi pembangunan fasilitas di IKN sebagai upaya pencegahan potensi bencana.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.40 WIB.

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,



Dr. H. ASHABUL KAHFI, M.Ag.